



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPARTININGSIH
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN FILSAFAT BARAT
3. NHK : 805044

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 220.454.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m²/45 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 136.224.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 356 m²/54 m² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 84.230.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 224.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, SUZUKI KARIMUN WAGON R Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 64.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
4. MOTOR, YAMAHA GEAR 125 S Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
5. MOTOR, HONDA BEAT 125 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
6. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 103.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 120.798.835



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 569.552.835

III. HUTANG

Rp. ----
Rp. 569.552.835

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.